



PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN MALAKA  
B E T U N

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN MALAKA  
NOMOR : 55.a/PKPO/XII/2014

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN MALAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membentuk perilaku dan kemampuan dasar anak usia dini agar memiliki kesiapan untuk memasuki sekolah dasar, perlu suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pembinaan bagi anak anak usia dini sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diselenggarakan melalui satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur nonformal berupa kelompok bermain (Kober);
  - c. bahwa berdasarkan hasil suvei dan verifikasi data usulan penyelenggaraan PAUD, maka kepada lembaga penyelenggara yang memenuhi syarat dapat diberikan izin operasional;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43011);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka Di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



...merintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Bupati Malaka Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2013 Nomor 03).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tahun anggaran 2014 - 2019 dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.

KETIGA : Penyelenggara PAUD berkewajiban sebagai berikut :

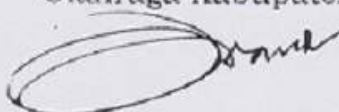
- a. melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka melalui Kepala Bidang Bina Pendidikan Dasar;
- b. menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang berlaku;

- c. tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
- d. wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir; dan
- e. jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Betun  
Pada tanggal 11 Desember 2014

B Kepala Dinas Pendidikan  
Kebudayaan Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Malaka,



ALEKS SERAN, SH  
Pembina Tk. I

NIP. 19631231 198403 1 328

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta;
2. Penjabat Bupati Malaka di Betun;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Malaka di Betun;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka di Betun;
6. Pengawas TK/SD Kecamatan Malaka Barat, Malaka Tengah dan Malaka Timur masing-masing di Tempat; dan
7. Para Penyelenggara PAUD masing-masing di Tempat.



NO	NAMA PAUD	NAMA PENYELENGGARA	NAMA PENDIDIK	ALAMAT			TAHUN BERDIRI
				DUSUN	DESA	KECAMATAN	
32	ALFA KASIH	MANUEL MAPLANI	63 MARIANA MOY	INJUMANU	INJUMANU	KALIMARAN	2011
33	1 ANAK MAXIS	GABRIEL MANEK	64 ADRIANA MAU	NUMPONI	NUMPONI	MALAKA TIMUR	2006
34	2 MATAK MALIRIN	LUAN IGNATIUS	65 VIKTORIA EETE	FOHOKIK	RASLUN	MALAKA TIMUR	2004
35	3 OAN NURAK	OKNI EVIANA RUA	66 OLIVA SEUK SERAN	BAKI DS	WEMEDA	MALAKA TIMUR	2000
36	4 SENDATA	YULIANA L. BRIA	67 EMERENTIANA MERA	DIRMA	DIRMA	MALAKA TIMUR	2007
37	5 TAKINA	M. GAUDENSIA LURUK	68 OKSILIA UN	NINDATAN	SANLEO	MALAKA TIMUR	2009
38	6 ST. MIKHAEL	ANTONIUS SERAN BEKIK	69 ERCHIE HANE	SANLEO	SANLEO	MALAKA TIMUR	2011
39	7 TARMAN MANAKUN	GABRIEL NAIKAK	70 NONCE RUA	SANLEO	SANLEO	MALAKA TIMUR	2011
40	8 TUNAS MUDA	MELDA LURUK FAHUK	71 SISILIA LOTU	BIRAI	WEMEDA	MALAKA TIMUR	2011
41	9 IMANUEL	THERESIA NALLEHI	72 MARTINA ULU	DIRMA	DIRMA	MALAKA TIMUR	2009
42	10 MERPATI	LUSIA LURUK	73 IKENE K. HANO BRIA	KUSA	KUSA	MALAKA TIMUR	2009
43	11 KUSA INDAH	HERMAN NANA	74 DELVIANA YANUARIA LOTU BOU	KUSA	KUSA	MALAKA TIMUR	2012
44	12 SINAR WEMEDA	BERTOLOMEUS LANA	75 MARIA MARINCE Y. SOI	WEMEDA	WEMEDA	MALAKA TIMUR	2012
45	13 SINAR KASIH	MIKHAEL SUBANI	76 YASINTHA ABUK	NUMPONI	NUMPONI	MALAKA TIMUR	2012
46	14 TAMAN SANI	MIKHAEL RIWU	77 YOVITA HOAR	NUMPONI	NUMPONI	MALAKA TIMUR	2012
47	15 ST. ELISABETH	EDUARDUS BAU	78 YULITA BOB	HAROE	SANLEO	MALAKA TIMUR	2012
			79 VINSENSIA BRIA				
			80 MARTHA SERAN				
			81 THERESIA NALLEHI				
			82 AGUSTINA DA CRUZ				
			83 FRANSISKA MUTI				
			84 MAGDALENA FRIDA MUTI				
			85 ELANDINA BUGU				
			86 MARIA OUT				
			87 ADIANA IKUN				
			88 YOVITA HANE				
			89 MARGARETHA EETE				
			90 MARIA YOVITA HOAR				
			91 THERESIA TAY TAE				
			92 MARIA ANITA TEKE				
			93 MARIA MAGDALENA BRIA				
			94 AGUSTINA DAHU				